



KONFLIK BERNUANSA RELIGIUS POLITIK DAN PROSES INTEGRASI BANGSA PASCA PEMILU TAHUN 2019 DI KALIMANTAN (STUDI DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DAN KALIMANTAN TENGAH)

Fauzi Aseri¹, Wahyuddin², Ahmadi Hasan³, M.Ramadhan⁴

^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri Antasari

E-mail : fauziakhmad749@gmail.com¹, wahyubanjarmasin@gmail.com², Ahmadihasan58@yahoo.com³, ramadhanid394@gmail.com⁴

Abstrak : Tujuan penelitian ini untuk mengetahui (1) peta konflik bernuansa religius politik pasca Pemilu 2019 pada masyarakat Kalimantan, (2) proses integrasi bangsa Pasca Pemilu 2019 pada masyarakat Kalimantan, (3.) interaksi konflik dengan integrasi pada masyarakat Kalimantan. Penelitian menggunakan pendekatan kombinasi (kuantitatif-kualitatif) dengan teknik penggali data menggunakan kuesioner, wawancara mendalam, dan dokumenter. Analisis data kuantitatif menggunakan analisis deskriptif frekuensi dan persentasi dengan program SPSS, sedang data kualitatif menggunakan teknik reduksi data, display data, dan verifikasi. Hasil penelitian adalah : (1) pada Pemilu 2019 terjadi konflik bernuansa religius-politis pada masyarakat di Kalimantan Selatan dan Tengah; (2) konflik lebih disebabkan oleh persaingan calon anggota legislatif, menyeret faktor keagamaan; (3) keterlibatan tokoh-tokoh agama berkontribusi terhadap konflik dan memiliki pengaruh besar; (4) pengetahuan agama para pengikut konflik cukup luas, memiliki perilaku dan pengamal agama yang baik serta taat beribadah; (5) media ceramah agama dan media cetak keagamaan turut mempengaruhi kondisi konflik. Pengaruh media sosial (medsos) berperan sangat besar terhadap terjadinya konflik pada Pemilu 2019; (6) kecenderungan pilihan politik masyarakat terhadap partai yang bukan partai berlandaskan agama (partai agama) yakni partai nasionalis cukup besar; (7) faktor agama dipandang tidak cukup kuat berperan dalam mewujudkan integrasi pasca konflik; (8) para responden tidak optimis bahwa kerukunan umat beragama lebih kuat terjalin pasca Pemilu 2019; (9) terdapat hubungan yang signifikan antara konflik dengan integrasi pada Pemilu 2019 pada masyarakat Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah; (10) terdapat hubungan yang signifikan antara sub-sub variabel konflik dengan variabel konflik; (11) terdapat hubungan antara sub-sub variabel integrasi dengan variabel integrasi.

Kata kunci : *Konflik, Religius-Politik, Integrasi, Pemilu 2019*

Abstract: The aim of this research is to determine (1) the conflict map with political and religious nuances after the 2019 election in Kalimantan society, (2) the process of national integration after the 2019 election in Kalimantan society, and (3.) the interaction of conflict with integration in Kalimantan society. The research uses a combined approach (quantitative-qualitative) with data mining techniques using questionnaires, in-depth interviews, and documentaries. Quantitative data analysis uses descriptive analysis of frequencies and percentages with the SPSS program, while qualitative data analysis uses data reduction, data display, and verification techniques. The results of the research are: (1) in the 2019 election there was a conflict with religious-political nuances among the people in South and Central Kalimantan; (2) the conflict is caused more by competition for legislative candidates, bringing in religious factors; (3) the involvement of religious figures contributes to the conflict and has a big influence; (4) the religious knowledge of the conflict followers is quite extensive; they have good religious behavior and practice and are devout in worship; (5) religious lecture

media and religious print media also influence conflict conditions. The influence of social media (medsos) played a very big role in the occurrence of conflict in the 2019 Election; (6) the tendency of people's political choices towards parties that are not parties based on religion (religious parties), namely nationalist parties, is quite large; (7) religious factors are seen as not playing a strong enough role in realizing post-conflict integration; (8) respondents are not optimistic that religious harmony will be stronger after the 2019 election; (9) there is a significant relationship between conflict and integration in the 2019 elections in the people of South Kalimantan and Central Kalimantan; (10) there is a significant relationship between conflict sub-variables and conflict variables; (11) there is a relationship between the integration sub-variables and the integration variables.

Key words: *Conflict, Religious-Political, Integration, 2019 Election*

Pendahuluan

Pemilihan Umum (Pemilu) untuk pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan anggota legislatif (Pileg) tahun 2019 sudah usai. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah mengumumkan hasilnya, bahkan Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan hasil sengketa Pilpres pada bulan Juli 2019. Meskipun presiden dan wakil presiden terpilih sebagai pemenang sudah ditetapkan, namun indikasi fenomena konflik di masyarakat masih tersisa bahkan melembaga di kalangan elit dan akar rumput khususnya di Kalimantan.

Kegaduhan sosial dan pertarungan emosional implikasi Pemilu 2019 bukan hanya membentuk polarisasi bangsa, melainkan juga telah mengancam disintegrasi bangsa yang sulit tersembuhkan dalam waktu singkat. Residu psikologis terus eksis sebagai potensi laten maupun manifes yang diprediksi akan mengganggu kelangsungan kehidupan bangsa dan harmonisasi sosial ke masa depan.

Pemilu 2019 secara nyata telah menyeret faktor religiusitas dalam bentuk emosi kegamaan, keyakinan dan pandangan keagamaan, serta umat dan golongan agama ke ranah konflik politik. Faktor agama telah memainkan peranan penting dalam fenomena konflik politik pada pesta demokrasi Pemilu 2019. Fenomena ini seperti mengulang kejadian Pemilu tahun 1955, yakni melibatkan sebuah pertarungan ideologis yang keras bahkan terkesan kasar dalam latar konflik politik yang membahayakan keutuhan dan keadaban bangsa Indonesia.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kombinasi (kuantitatif-kualitatif), menggunakan teknik pengumpul data kuesioner, wawancara, dan dokumenter. Penarikan sampel dilakukan secara random, dan pemilihan informan dilakukan secara purposive. Lokasi penelitian di Kalimantan Selatan untuk pengumpulan data kuantitatif meliputi kabupaten Hulu Sungai Tengah, kabupaten Tabalong, kabupaten Tanah Laut, dan kabupaten Tanah Bumbu. Di provinsi Kalimantan Tengah meliputi kabupaten Kota Waringin Timur, kabupaten Barito Utara, dan kabupaten Barito Timur. Lokasi penelitian untuk penggalan data kualitatif, di Kalimantan Selatan meliputi kabupaten Tanah Laut dan kota Banjarbaru. Sedangkan di Kalimantan Tengah meliputi Kabupaten Pulang Pisau dan kabupaten Kapuas. Analisis data kuantitatif dilakukan dengan analisis deskriptif dengan program SPSS. Sedangkan analisis data kualitatif dengan teknik reduksi data, display, dan verifikasi.

Hasil dan Pembahasan

A. Gambaran Lokasi Penelitian

1. Kalimantan Selatan

a. Geografis

Kalimantan Selatan secara geografis berada di tenggara pulau Kalimantan. Memiliki kawasan dataran rendah di bagian barat dan pantai timur, serta dataran tinggi yang dibentuk oleh pegunungan Meratus di bagian tengah. Kalimantan Selatan memiliki batas wilayah : sebelah barat dengan Provinsi Kalimantan Tengah, sebelah timur dengan Selat Makasar, sebelah selatan dengan Laut Jawa, dan sebelah utara dengan Provinsi Kalimantan Timur. Luas wilayahnya adalah sekitar 37.530, 52 km² atau 6,98 persen dari luas pulau Kalimantan, atau 1,96 persen dari luas wilayah Indonesia.

b. Demografis

Secara demografis Kalimantan Selatan terdiri dari berbagai etnis. Etnis yang mendiami Kalimantan Selatan terdiri dari etnis Banjar (74.34 %), etnis Jawa (14.51 %), etnis Bugis (2.81 %), etnis Dayak (2.23 %), etnis Madura (1.47 %), etnis Mandar (1.10 %), etnis Sunda (0.68 %), etnis Tionghoa (0.36 %), etnis Batak (0.34 %), etnis Bali (0.33 %), dan etni-etnis lain (1.82 %).

Mayoritas penduduk Kalimantan Selatan adalah etnis Banjar (74.34 %) yang terdiri dari sub etnis Banjar Kuala, Banjar Hulu, dan Banjar Batang Banyu. Banjar Kuala mendiami kawasan Banjar Bakula atau hilir sungai Barito dan anak-anak sungainya serta sungai Tabonio. Banjar Pahuluan mendiami kawasan hulu Banua Anam atau aliran-aliran sungai yang berhulu di pegunungan Meratus. Sedangkan Banjar Batang Banyu mendiami kawasan hilir Banua Anam pada aliran Sungai Nagara.

Etnis terbesar kedua adalah etnis Jawa (14.51 %) yang sebagian besar menghuni daerah kantong-kantong pemukiman di kawasan transmigrasi dan kota Banjarbaru. Awal mula kedatangan etnis Jawa secara menetap mengikuti program kolonisasi atau transmigrasi pada masa kolonial Hindia Belanda dengan membuka lahan gambut di daerah Tamban Barito Kuala. Mereka disebut Orang Jawa Tamban. Kedatangan transmigran semakin masif dan intensif pada masa Orde Baru.

c. Sejarah

Kalimantan Selatan pada masa lalu berawal dari tiga kerajaan besar yang pernah berkuasa di daerah ini, yakni berturut-turut Kerajaan Negara Dipa, Kerajaan Negara Daha, dan Kesultanan Banjar.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, Kalimantan Selatan merupakan provinsi tersendiri dengan gubernur pertama Ir. Pangeran Muhammad Noor yang menjabat sampai peristiwa Perjanjian Linggar Jati. Berdasarkan perjanjian Linggar Jati, Kalimantan Selatan terpisah dengan Republik Indonesia. Organisasi Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI) Divisi IV Mojokerto Jawa Timur yang mempersatukan kekuatan dan pejuang asal Kalimantan yang berada di pulau Jawa, mengambil langkah untuk kedaulatan Kalimantan sebagai wilayah Indonesia dengan melaksanakan proklamasi yang ditandatangani oleh Gubernur ALRI H.Hasan Basry di Niih Kandangan pada tanggal 17 Mei 1949. Proklamasi ini menyatakan bahwa rakyat Indonesia Kalimantan Selatan memaklumkan berdirinya pemerintahan Gubernur tentara ALRI yang melingkupi seluruh wilayah Kalimantan Selatan dan Tengah sebagai bagian dari wilayah Republik

Indonesia hasil Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Upaya ini merupakan tandingan atas dibentuknya Dewan Banjar oleh Belanda.

d. Pemerintahan

Sejak tanggal 14 Agustus 2011 aktivitas pemerintahan Kalimantan Selatan berpindah dari Kota Banjarmasin ke Kota Banjarbaru. Di daerah baru ini berdiri kantor-kantor penting instansi pemerintahan provinsi. Dipilihnya kota ini menjadi pusat pemerintahan karena pertimbangan guna pengembangan kota ke masa yang akan datang.

Sejak tahun 1945-1957 gubernur mengepalai provinsi Kalimantan, dan sejak tahun 1957 hanya tinggal provinsi Kalimantan Selatan yang beribukota di Banjarmasin.

Berikut para gubernur berikut masa jabatannya yang pernah menjadi kepala daerah Kalimantan Selatan berturut-turut : Syarkawi (1957-1959), Maksid (1959-1963), Abu Jahid Bastomi (penjabat,1963), Aberani Sulaiman (1963-1963), Jamani (1968-1970), Subarjo Sosroyo (1970-1980), Mistar Cokrokusumo (1980-1984), Muhammad Said (1984-1995), Gusti Hasan Aman (1995-2000), Syahril Darham (2000-2005), Tursandi Alwi (penjabat, 2005), Rudy Arifin (2005-2010, 2010-2015), Tarmizi Abdul Karim (penjabat, 2015-2016), dan SahbirinnNoor (2016-sekarang).

Kalimantan Selatan memiliki dua kota dan sebelas kabupaten, yakni Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Balangan, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Tanah Laut, dan Kabupaten Tapin. Kalimantan Selatan terdiri dari 153 kecamatan, 144 kelurahan, serta 1864 desa.

e. Perekonomian

Sektor pertanian merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Pada bulan Februari 2012 tercatat sebanyak 38,20 persen tenaga kerja diserap sektor pertanian. Sektor perdagangan adalah sektor kedua terbesar dalam penyerapan tenaga kerja, yaitu sebesar 20,59 persen. Status pekerja di Kalimantan Selatan masih didominasi oleh pekerja yang bekerja di sektor informal. Pada Februari 2012 sebanyak 63,20 persen adalah pekerja di sektor informal. Sebagian besar dari pekerja tersebut berstatus berusaha sendiri (19,66 persen), berusaha dibantu buruh tidak tetap (18,92 persen) serta pekerja bebas dan pekerja tak dibayar (24,61 persen). Pekerja di sektor formal tercatat sebanyak 36,80 persen yaitu terdiri dari pekerja dengan status buruh/karyawan (33,35 persen) dan status berusaha dibantu dengan buruh tetap (3,45 persen).

f. Keberagaman

Prosentase penganut agama di Kalimantan Selatan (2018) sebagai berikut : [Islam](#) (97.12%), [Kristen Protestan](#) (1.42%), [Hindu](#) (0.70%), [Katolik](#) (0.44%), [Buddha](#) (0.31%), Lainnya (0.01 %). Selain itu ada juga penganut agama [Kristen Protestan](#), [Katolik](#), [Hindu](#), [Buddha](#), [Khonghucu](#) serta [Kaharingan](#) yang dianut masyarakat di kawasan Pegunungan Meratus.

Berikut adalah data penduduk menurut agama yang dianut tahun 2010 dan penduduk menurut agama tahun 2015 dan tempat ibadah data 2010).

Penduduk menurut agama yang dianut

Nomor	Agama	Jumlah (2015)	Konsentrasi	Jumlah (2010)	Konsentrasi
1	Islam	3.772.700	96.48%	3.505.000	96,67%
2	Kristen Protestan	39.277	1.00%	47.974	1,32%
3	Hindu	63.073	1.61%	16.064	0,44%
4	Katolik	22.234	0.56%	16.045	0,44%
5	Buddha	13.109	0.34%	11.675	0,32%
6	Khonghucu	300	0.01%	236	0,01%
7	Lainnya			28.776	0,79%
	Total	3.910.393	100,00%	3.626.616	100,00%

1) Tempat ibadah

Tempat ibadah (2009)

Nomor	Agama	Tempat Ibadah	Jumlah
1	Islam	Masjid	2.368
		Musala/Langgar	7.038
		Jumlah	9.406
2	Kristen	Gereja	86
		Semi/Darurat	66
		Jumlah	152
3	Katolik	Gereja	11
		Kapel/Darurat	48
		Jumlah	59
4	Hindu	Pura/Kuil	62
		Sangah/Balai	1.328
		Jumlah	1.390
4	Buddha	Vihara/Cetya	21

Tempat ibadah (2009)

Nomor	Agama	Tempat Ibadah	Jumlah
		Klenteng	3
		Jumlah	24

Berikut adalah data penduduk menurut agama yang dianut tahun 2010 dan penduduk menurut agama tahun 2015 dan tempat ibadah data 2010).

Penduduk menurut agama yang dianut

No	Agama	Jumlah (2015)	Konsentrasi	Jumlah (2010)	Konsentrasi
1	Islam	3.772.700	96,48%	3.505.000	96,67%
2	Kristen Protestan	39.277	1,00%	47.974	1,32%
3	Hindu	63.073	1,61%	16.064	0,44%
4	Katolik	22.234	0,56%	16.045	0,44%
5	Buddha	13.109	0,34%	11.675	0,32%
6	Khonghucu	300	0,01%	236	0,01%
7	Lainnya			28.776	0,79%
	Total	3.910.393	100,00%	3.626.616	100,00%

2. Kalimantan Tengah

a. Geografis dan Demografis

Kalimantan Tengah (disingkat Kalteng) adalah salah satu [provinsi](#) di [Indonesia](#) yang terletak di Pulau [Kalimantan](#). Ibu kotanya adalah [Kota Palangkaraya](#). Kalimantan Tengah memiliki luas 153.564,60 km². Berdasarkan [sensus tahun 2010](#), provinsi ini memiliki populasi 2.202.599 jiwa, yang terdiri atas 1.147.878 laki-laki dan 1.054.721 perempuan. Data BPS Kalimantan Tengah tahun 2019 menunjukkan penduduk provinsi ini tahun 2018 bertambah menjadi 2.660.209 (Laki-laki 1.391.078 jiwa dan perempuan 1.269.131 jiwa). Kalimantan Tengah mempunyai 13 [kabupaten](#) dan 1 [kota](#).

Tiga etnis dominan di Kalimantan Tengah yaitu etnis [Dayak](#) (46,62%), [Jawa](#) (21,67%) dan [Banjar](#) (21,03%). Kawasan utama etnis Dayak yaitu daerah pedalaman, Kawasan utama etnis Jawa yaitu daerah transmigrasi dan Kawasan utama etnis Banjar yaitu daerah pesisir dan perkotaan.

Etnis Dayak adalah etnis terbesar di Kalteng dengan jumlah 1.029.182 atau 46,62% dari populasi Kalteng. Beberapa subetnis Dayak yang terdapat di Kalteng yaitu [Ngaju](#) (subetnis terbesar yang mendiami daerah aliran sungai Kapuas, Kahayan, Rungan Manuhing, Barito dan Katingan), [Bakumpai](#) (mendiami tepian daerah aliran sungai Barito), [Maanyan](#) (mendiami bagian timur Kalteng seperti Barito Timur dan Barito Selatan), [Ot Danum](#) (mendiami daerah utara Kalteng), [Siang Murung](#) (mendiami Timur Laut Kalteng/Kabupaten Murung Raya), [Taboyan](#) (mendiami sepanjang tepian aliran Sungai Teweh), [Lawangan](#) (mendiami bagian timur Kalteng/Barito Timur), [Dusun](#) (mendiami wilayah aliran sungai Barito dari Barito Selatan sampai Murung Raya), dan subetnis lainnya dalam jumlah kecil. Orang Dayak di Kalteng umumnya berprofesi sebagai petani dan pegawai pemerintahan.

Etnis Jawa merupakan etnis terbesar kedua di Kalteng dengan jumlah 478.393 atau 21,67% dari populasi Kalteng. Di beberapa kabupaten, seperti [Kotawaringin Barat](#) dan [Pulang Pisau](#), etnis Jawa adalah penduduk mayoritas. Orang Jawa di Kalteng umumnya berprofesi sebagai petani, pegawai, TNI/Polri, pedagang makanan dan pekerja tambang/sawit. Kesenian Jawa seperti kuda lumping, reog, wayang kulit dan bahasa Jawa masih bertahan di kantong-kantong transmigrasi di Kalteng. Besarnya proporsi orang Jawa di Kalteng karena banyaknya transmigrasi asal Jawa Tengah, Yogyakarta dan Jawa Timur yang masuk ke Kalteng.

Etnis Banjar merupakan etnis terbesar ketiga di Kalteng dengan jumlah 464.260 atau 21,03% dari populasi Kalteng. Di Kalteng, orang Banjar banyak berada di wilayah perkotaan seperti [Palangka Raya](#), [Kotawaringin Timur](#) (Sampit) dan [Kapuas](#) yang berbatasan langsung dengan Kalimantan Selatan. Orang Banjar di Kalteng umumnya bekerja sebagai pedagang dan wiraswasta, sehingga kuliner, masakan dan bahasa Banjar cukup dominan di Kalteng. Berbagai upacara adat Banjar, seperti pada upacara pernikahan, kelahiran (tasmiyah), batamat Al Qur'an, selamatan, baayun mulud dan sebagian kesenian Banjar, seperti hadrah dan maulid habsyi masih bertahan di Kalteng. Namun kesenian lainnya seperti tari-tarian, madihin, mamanda dan musik panting sudah jarang ditampilkan di Kalteng.

Etnis [Melayu](#) merupakan etnis terbesar keempat di Kalteng dengan jumlah 87.348 atau 3,96% dari populasi Kalteng yang menempati pesisir [Sukamara](#) dan [Kotawaringin Barat](#). Melayu di Kalteng biasa disebut Melayu Kotawaringin yang adat budayanya tidak jauh berbeda dengan orang Melayu Kalbar dan orang Banjar.

Etnis [Madura](#) merupakan etnis terbesar kelima di Kalteng dengan jumlah 42.668 atau 1,93% dari populasi Kalteng. Di Kalteng, orang Madura yang juga banyak berprofesi sebagai pedagang banyak mendiami daerah [Kotawaringin Barat](#) dan [Kotawaringin Timur](#). Setelah konflik etnis tahun 2001, sebagian warga Madura sudah berangsur-angsur kembali ke Kalteng.

Etnis terbesar keenam hingga kesepuluh yaitu [Sunda](#) (1,29%), [Bugis](#) (0,77%), [Batak](#) (0,56%), [Flores](#) (0,38%) dan [Bali](#) (0,33%) serta suku-suku lainnya dari berbagai daerah di Indonesia. Etnis Sunda, Flores dan Bali di Kalteng juga terdapat di wilayah-wilayah transmigrasi, namun jumlahnya tidak sebanyak etnis Jawa. Etnis Bugis di Kalteng sebagian besar merupakan kelompok [Bugis Pagatan](#) dari Kalimantan Selatan yang merantau ke Kalteng. Etnis Batak di Kalteng terdapat di wilayah perkotaan baik sebagai pegawai dan birokrat, maupun di pedalaman sebagai pekerja tambang dan sawit.

Komposisi Suku Bangsa di Kalimantan Tengah, yaitu:

N o.	Suku bangsa	Jumlah (2010) ¹³¹	Konsentrasi (2010)	Jumlah (2000) ¹²⁷¹	Konsentrasi (2000)
1	Dayak	1.029.182	46,62%	Tidak ada data	Tidak ada data
2	Jawa	478.393	21,67%	325.160	18,06%
2	Banjar	464.260	21,03%	435.758	24,20%
4	Melayu	87.348	3,96%	Tidak ada data	Tidak ada data
5	Madura	42.668	1,93%	62.228	3,46%
6	Sunda	28.580	1,29%	24.479	1,36%
7	Bugis	17.104	0,77%	Tidak ada data	Tidak ada data
8	Batak	12.324	0,56%	Tidak ada data	Tidak ada data
9	Flores	8.372	0,38%	Tidak ada data	Tidak ada data
10	Bali	7.348	0,33%	Tidak ada data	Tidak ada data
11	Suku-suku lainnya	31.788	1,44%	-	-
	Total	2.207.367	100,00%	1.800.713	100,00%

b. Keberagamaan

Agama yang dipeluk masyarakat Kalimantan Tengah berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kalimantan Tengah 2019 adalah : Islam berjumlah 1.897.722 jiwa (73,82 %), Kristen Protestan berjumlah 430.661 jiwa (16,75 %), Katolik berjumlah 80.119 jiwa (3,12 %), Hindu/Kaharingan berjumlah 158.181 jiwa (6,15 %), Budha berjumlah 2.798 jiwa (0,11 %), Konghucu berjumlah 2018 jiwa (0,01 %), dan lainnya berjumlah 1.050 jiwa (0,04 %).

Agama Islam pada umumnya dipeluk oleh etnis Banjar, Jawa, Melayu, Sunda, serta sebagian kecil suku Dayak. Agama Kristen Protestan dipeluk oleh sebagian besar etnis Dayak, Minahasa, Batak, Flores, dan Papua. Agama Katolik dipeluk oleh sebagian besar etnis Dayak, Batak, Minahasa, Flores, dan Papua.

Sedangkan Kaharingan adalah kepercayaan etnis Dayak Kalimantan Tengah (pada Sensus 2010 digabungkan dengan kelompok agama lainnya). Penganut agama Kaharingan tersebar di wilayah Kalimantan Tengah, mereka banyak terdapat di bahagian hulu sungai, yakni hulu sungai

Kahayan, sungai Katingan, dan sungai-sungai lainnya. Kepercayaan Kaharingan dimasukkan dalam agama Hindu yang pada umumnya dianut oleh orang Bali. Penganut agama Konghucu dianut oleh orang Tionghoa.

c. Wilayah Administratif

Provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari 13 kabupaten, 1 kota, 136 kecamatan, 139 kelurahan dan 1.432 desa. Jumlah penduduknya pada tahun 2017 mencapai 2.502.630 jiwa dengan luas wilayah 153. 564,50 km2.

Kota dan kabupaten di provinsi Kalimantan Tengah meliputi : kota Palangkaraya, kabupaten Barito Selatan, kabupaten Barito Timur, kabupaten Barito Utara, kabupaten Gunung Mas, kabupaten Kapuas kabupaten Katingan, kabupaten Kotawaringin Barat, kabupaten Kotawaringin Timur, kabupaten Lamandau, kabupaten Murung Raya, kabupat Pulang Pisau, kabupaten Seruyan, dan kabupaten Sukamara.

B. Konflik Benuansa Religius-Politis

1. Deskripsi Data Kuantitatif

a. Distribusi Frekuensi Konflik

Tabel 3.1 Distribusi Frekuensi Total Konflik Benuansa Religius-Politik dan Proses Integrasi Bangsa Pasca Pemilu 2019 di Kalimantan

Tabel 3.2 Distribusi Frekuensi Intensitas Terjadinya Konflik Saat dan Pasca Pemilu

BUTIR1				
	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	.00	7	11.1	11.1
	1.00	37	58.7	69.8
	2.00	19	30.2	100.0
Total		63	100.0	

Berdasarkan tabel di atas, dari 63 responden yang tersebar di provinsi Kalimantan Selatan dan Tengah menyatakan bahwa 7 orang atau 11,1% tidak pernah tahu mengenai kejadian konflik pada saat maupun pasca pemilu 2019 di wilayahnya, 37 orang atau 58,7% menyatakan tidak pernah

terjadi konflik, dan 19 orang atau 30,2% menyatakan bahwa telah terjadi konflik pada saat maupun pasca pemilu 2019 di wilayahnya tersebut.

2) Tingkat Wilayah Konflik

Tabel 3.3 Distribusi Frekuensi Intensitas Konflik Berdasarkan Tingkatan Wilayah

BUTIR2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	20	31.7	31.7	31.7
	2.00	4	6.3	6.3	38.1
	3.00	3	4.8	4.8	42.9
	4.00	14	22.2	22.2	65.1
	5.00	22	34.9	34.9	100.0
	Total	63	100.0	100.0	

Berdasarkan tabel di atas, dari 63 responden yang tersebar di provinsi Kalimantan Selatan dan Tengah, 20 orang atau 31,7% menyatakan bahwa konflik saat maupun pasca pemilu 2019 terjadi pada tingkat RT/RW, 4 orang atau 6,3% menyatakan bahwa konflik saat maupun pasca pemilu 2019 terjadi pada tingkat desa/kelurahan, 3 orang atau 4,8% menyatakan bahwa konflik saat maupun pasca pemilu 2019 terjadi pada tingkat kecamatan, 14 orang atau 22,2% menyatakan bahwa konflik saat maupun pasca pemilu 2019 terjadi pada tingkat kabupaten, dan 22 orang atau 34,9% menyatakan bahwa konflik saat maupun pasca pemilu 2019 terjadi pada tingkat beberapa kabupaten.

3) Eskalasi Konflik

Tabel 3.4 Distribusi Frekuensi Intensitas Konflik Berdasarkan Tingkatan Perluasan Wilayah

BUTIR3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	53	84.1	84.1	84.1
	2.00	4	6.3	6.3	90.5
	3.00	6	9.5	9.5	100.0
	Total	63	100.0	100.0	

Berdasarkan tabel di atas, dari 63 responden yang tersebar di provinsi Kalimantan Selatan dan Tengah, 53 orang atau 84,1% menyatakan bahwa konflik saat maupun pasca pemilu 2019 tidak meluas, 4 orang atau 6,3% menyatakan bahwa konflik saat maupun pasca pemilu 2019 kurang meluas, dan 6 orang atau 9,5% menyatakan bahwa konflik saat maupun pasca pemilu 2019 cukup meluas.

4) Akibat Konflik

Tabel 3.5 Distribusi Frekuensi Intensitas Akibat Pasca Konflik Saat dan Sesudah Pemilu

BUTIR4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	10	15.9	15.9	15.9
	2.00	33	52.4	52.4	68.3
	3.00	7	11.1	11.1	79.4
	4.00	10	15.9	15.9	95.2
	5.00	3	4.8	4.8	100.0
	Total	63	100.0	100.0	

Berdasarkan tabel di atas, dari 63 responden yang tersebar di provinsi Kalimantan Selatan dan Tengah, 10 orang atau 15,9% menyatakan bahwa sangat tidak benar konflik saat maupun pasca pemilu 2019 mengakibatkan akibat, 33 orang atau 52,4% menyatakan bahwa tidak benar konflik saat maupun pasca pemilu 2019 mengakibatkan akibat, 7 orang atau 11,1% menyatakan bahwa kurang benar konflik saat maupun pasca pemilu 2019 mengakibatkan akibat, 10 orang atau 15,9% menyatakan bahwa cukup benar konflik saat maupun pasca pemilu 2019 mengakibatkan akibat, dan 3 orang atau 4,8% menyatakan bahwa sangat benar konflik saat maupun pasca pemilu 2019 mengakibatkan akibat.

5) Potensi Konflik Persaingan Anggota Legislatif

Tabel 3.6 Distribusi Frekuensi Potensi Konflik Akibat Persaingan Calon Anggota DPRD/DPR/DPD di Daerah

BUTIR5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	33	52.4	52.4	52.4
	2.00	16	25.4	25.4	77.8
	3.00	9	14.3	14.3	92.1
	4.00	5	7.9	7.9	100.0
	Total	63	100.0	100.0	

Berdasarkan tabel di atas, dari 63 responden yang tersebar di provinsi Kalimantan Selatan dan Tengah, 49 orang atau 77,8% menyatakan bahwa faktor persaingan calon anggota DPRD/DPR/DPD di daerah memiliki potensi yang tinggi untuk mengakibatkan konflik, sedangkan 14 orang lainnya atau 22,2% lainnya menyatakan bahwa faktor persaingan calon anggota DPRD/DPR/DPD di daerah tidak memiliki potensi yang tinggi untuk mengakibatkan konflik.

6) Potensi Konflik Faktor Keyakinan Agama

Tabel 3.7 Distribusi Frekuensi Potensi Konflik Akibat Faktor Keyakinan Agama

BUTIR6

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1.00	8	12.7	12.7	12.7
2.00	32	50.8	50.8	63.5
3.00	11	17.5	17.5	81.0
4.00	9	14.3	14.3	95.2
5.00	3	4.8	4.8	100.0
Total	63	100.0	100.0	

Berdasarkan tabel di atas, dari 63 responden yang tersebar di provinsi Kalimantan Selatan dan Tengah, 8 orang atau 12,7% menyatakan bahwa sangat benar konflik di daerah dipicu oleh faktor keyakinan keagamaan, 32 orang atau 50,8% menyatakan bahwa cukup benar konflik di daerah dipicu oleh faktor keyakinan keagamaan, 11 orang atau 17,5% menyatakan bahwa kurang benar konflik di daerah dipicu oleh faktor keyakinan keagamaan, 9 orang atau 14,3% menyatakan bahwa tidak benar konflik di daerah dipicu oleh faktor keyakinan keagamaan, dan 3 orang atau 4,8% menyatakan bahwa sangat tidak benar konflik di daerah dipicu oleh faktor keyakinan keagamaan.

7) Potensi Konflik Faktor Perbedaan Agama

Tabel 3.8 Distribusi Frekuensi Potensi Konflik Akibat Faktor Perbedaan Agama

BUTIR7

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2.00	42	66.7	66.7	66.7
3.00	12	19.0	19.0	85.7
4.00	7	11.1	11.1	96.8
5.00	2	3.2	3.2	100.0
Total	63	100.0	100.0	

Berdasarkan tabel di atas, dari 63 responden yang tersebar di provinsi Kalimantan Selatan dan Tengah, 42 orang atau 6,7% menyatakan bahwa cukup benar konflik di daerah dipicu oleh faktor perbedaan agama, 12 orang atau 19,0% menyatakan bahwa kurang benar konflik di daerah dipicu oleh faktor perbedaan agama, 7 orang atau 11,1% menyatakan bahwa tidak benar konflik di daerah dipicu oleh faktor perbedaan agama, dan 2 orang atau 3,2% menyatakan bahwa sangat tidak benar konflik di daerah dipicu oleh faktor perbedaan agama.

8) Profil Keagamaan Capres-Cawapres

Tabel 3.9 Distribusi Frekuensi Persepsi Tentang Perbedaan Profil Calon Presiden dan Wakil Presiden Pada Pemilu 2019

BUTIR8

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	7	11.1	11.3	11.3
	2.00	21	33.3	33.9	45.2
	3.00	8	12.7	12.9	58.1
	4.00	17	27.0	27.4	85.5
	5.00	9	14.3	14.5	100.0
	Total	62	98.4	100.0	
Missing	System	1	1.6		
Total		63	100.0		

Berdasarkan tabel di atas, dari 63 responden yang tersebar di provinsi Kalimantan Selatan dan Tengah, 7 orang atau 11,1% menyatakan bahwa sangat benar kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden pada pemilu 2019 memperlihatkan perbedaan profil atau jati diri keagamaan, 21 orang atau 33,3% menyatakan bahwa cukup benar kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden pada pemilu 2019 memperlihatkan perbedaan profil atau jati diri keagamaan, 8 orang atau 12,7% menyatakan bahwa kurang benar kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden pada pemilu 2019 memperlihatkan perbedaan profil atau jati diri keagamaan, 17 orang atau 27,0% menyatakan bahwa tidak benar kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden pada pemilu 2019 memperlihatkan perbedaan profil atau jati diri keagamaan, dan 9 orang atau 14,3% menyatakan bahwa sangat tidak benar kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden pada pemilu 2019 memperlihatkan perbedaan profil atau jati diri keagamaan.

9) Keterlibatan Tokoh Agama

Tabel 3.10 Distribusi Frekuensi Intensitas Keterlibatan Tokoh Agama

BUTIR14

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	3	4.8	4.8	4.8
	2.00	20	31.7	31.7	36.5
	3.00	10	15.9	15.9	52.4
	4.00	17	27.0	27.0	79.4
	5.00	13	20.6	20.6	100.0
	Total	63	100.0	100.0	

Berdasarkan tabel di atas, dari 63 responden yang tersebar di provinsi Kalimantan Selatan dan Tengah, 3 orang atau 4,8% menyatakan bahwa sangat benar dalam peristiwa konflik di masyarakat melibatkan tokoh-tokoh agama, 20 orang atau 31,7% menyatakan bahwa cukup benar dalam peristiwa konflik di masyarakat melibatkan tokoh-tokoh agama, 10 orang atau 15,9% menyatakan bahwa kurang benar dalam peristiwa konflik di masyarakat melibatkan tokoh-tokoh agama, 17 orang atau 27,0% menyatakan bahwa tidak benar dalam peristiwa konflik di masyarakat melibatkan tokoh-tokoh agama, dan 13 orang atau 20,6% menyatakan bahwa sangat tidak benar dalam peristiwa konflik di masyarakat melibatkan tokoh-tokoh agama.

10) Keterlibatan Emosi Keagamaan

Tabel 3.11 Distribusi Frekuensi Intensitas Keterlibatan Perasaan Keagamaan

BUTIR15

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1.00	4	6.3	6.3	6.3
2.00	22	34.9	34.9	41.3
3.00	19	30.2	30.2	71.4
4.00	15	23.8	23.8	95.2
5.00	3	4.8	4.8	100.0
Total	63	100.0	100.0	

Berdasarkan tabel di atas, dari 63 responden yang tersebar di provinsi Kalimantan Selatan dan Tengah, 4 orang atau 6,3% menyatakan bahwa sangat benar dalam peristiwa konflik di masyarakat melibatkan emosi (perasaan) keagamaan, 22 orang atau 34,9% menyatakan bahwa cukup benar dalam peristiwa konflik di masyarakat melibatkan emosi (perasaan) keagamaan, 19 orang atau 30,2% menyatakan bahwa kurang benar dalam peristiwa konflik di masyarakat melibatkan emosi (perasaan) keagamaan, 15 orang atau 23,8% menyatakan bahwa tidak benar dalam peristiwa konflik di masyarakat melibatkan emosi (perasaan) keagamaan, dan 3 orang atau 4,8% menyatakan bahwa sangat tidak benar dalam peristiwa konflik di masyarakat melibatkan emosi (perasaan) keagamaan.

11) Keterlibatan Simbol Keagamaan

Tabel 3.12 Distribusi Frekuensi Intensitas Keterlibatan Simbol-Simbol Keagamaan

BUTIR16

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1.00	7	11.1	11.1	11.1
2.00	29	46.0	46.0	57.1
3.00	14	22.2	22.2	79.4
4.00	11	17.5	17.5	96.8
5.00	2	3.2	3.2	100.0
Total	63	100.0	100.0	

Berdasarkan tabel di atas, dari 63 responden yang tersebar di provinsi Kalimantan Selatan dan Tengah, 7 orang atau 11,1% menyatakan bahwa sangat benar dalam peristiwa konflik di masyarakat melibatkan simbol-simbol keagamaan, 29 orang atau 46,0% menyatakan bahwa cukup benar dalam peristiwa konflik di masyarakat melibatkan simbol-simbol keagamaan, 14 orang atau 22,2% menyatakan bahwa kurang benar dalam peristiwa konflik di masyarakat melibatkan simbol-simbol keagamaan, 11 orang atau 17,5% menyatakan bahwa tidak benar dalam peristiwa konflik di masyarakat melibatkan simbol-simbol keagamaan, dan 2 orang atau 3,2% menyatakan bahwa sangat tidak benar dalam peristiwa konflik di masyarakat melibatkan simbol-simbol keagamaan.

12) Keterlibatan Isu atau Paham Keagamaan

Tabel 3.13 Distribusi Frekuensi Intensitas Keterlibatan Isu atau Paham Keagamaan

BUTIR17

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1.00	7	11.1	11.1	11.1
2.00	26	41.3	41.3	52.4
3.00	10	15.9	15.9	68.3
4.00	17	27.0	27.0	95.2
5.00	3	4.8	4.8	100.0
Total	63	100.0	100.0	

Berdasarkan tabel di atas, dari 63 responden yang tersebar di provinsi Kalimantan Selatan dan Tengah, 7 orang atau 11,1% menyatakan bahwa sangat benar dalam peristiwa konflik di masyarakat melibatkan isu atau paham keagamaan, 26 orang atau 41,3% menyatakan bahwa cukup benar dalam peristiwa konflik di masyarakat melibatkan isu atau paham keagamaan, 10 orang atau 15,9% menyatakan bahwa kurang benar dalam peristiwa konflik di masyarakat melibatkan isu atau paham keagamaan, 17 orang atau 27,0% menyatakan bahwa tidak benar dalam peristiwa konflik di masyarakat melibatkan isu atau paham keagamaan, dan 3 orang atau 4,8% menyatakan bahwa sangat tidak benar dalam peristiwa konflik di masyarakat melibatkan isu atau paham keagamaan.

13) Keterlibatan Tempat Ibadah

Tabel 3.14 Distribusi Frekuensi Intensitas Keterlibatan Tempat Ibadah

BUTIR18

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1.00	11	17.5	17.5	17.5
2.00	36	57.1	57.1	74.6
3.00	5	7.9	7.9	82.5
4.00	10	15.9	15.9	98.4
5.00	1	1.6	1.6	100.0
Total	63	100.0	100.0	

Berdasarkan tabel di atas, dari 63 responden yang tersebar di provinsi Kalimantan Selatan dan Tengah, 11 orang atau 17,5% menyatakan bahwa sangat benar dalam peristiwa konflik di masyarakat melibatkan tempat ibadah, 36 orang atau 57,1% menyatakan bahwa cukup benar dalam peristiwa konflik di masyarakat melibatkan tempat ibadah, 5 orang atau 7,9% menyatakan bahwa kurang benar dalam peristiwa konflik di masyarakat melibatkan tempat ibadah, 10 orang atau 15,9% menyatakan bahwa tidak benar dalam peristiwa konflik di masyarakat melibatkan tempat ibadah, dan 1 orang atau 1,6% menyatakan bahwa sangat tidak benar dalam peristiwa konflik di masyarakat melibatkan tempat ibadah.

14) Keterlibatan Organisasi Keagamaan

Tabel 3.15 Distribusi Frekuensi Intensitas Keterlibatan Organisasi Keagamaan

BUTIR19

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	8	12.7	12.7	12.7
	2.00	29	46.0	46.0	58.7
	3.00	8	12.7	12.7	71.4
	4.00	14	22.2	22.2	93.7
	5.00	4	6.3	6.3	100.0
	Total	63	100.0	100.0	

Berdasarkan tabel di atas, dari 63 responden yang tersebar di provinsi Kalimantan Selatan dan Tengah, 8 orang atau 12,7% menyatakan bahwa sangat benar dalam peristiwa konflik di masyarakat melibatkan organisasi keagamaan, 29 orang atau 46,0% menyatakan bahwa cukup benar dalam peristiwa konflik di masyarakat melibatkan organisasi keagamaan, 8 orang atau 12,7% menyatakan bahwa kurang benar dalam peristiwa konflik di masyarakat melibatkan organisasi keagamaan, 14 orang atau 22,2% menyatakan bahwa tidak benar dalam peristiwa konflik di masyarakat melibatkan organisasi keagamaan, dan 4 orang atau 6,3% menyatakan bahwa sangat tidak benar dalam peristiwa konflik di masyarakat melibatkan organisasi keagamaan.

15) Keterlibatan Lembaga Keagamaan

Tabel 3.16 Distribusi Frekuensi Intensitas Keterlibatan Lembaga Keagamaan

BUTIR20

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	9	14.3	14.3	14.3
	2.00	32	50.8	50.8	65.1
	3.00	9	14.3	14.3	79.4
	4.00	7	11.1	11.1	90.5
	5.00	6	9.5	9.5	100.0
	Total	63	100.0	100.0	

Berdasarkan tabel di atas, dari 63 responden yang tersebar di provinsi Kalimantan Selatan dan Tengah, 9 orang atau 14,3% menyatakan bahwa sangat benar dalam peristiwa konflik di masyarakat melibatkan lembaga keagamaan seperti majlis ta'lim atau perkumpulan keagamaan, 32 orang atau 50,8% menyatakan bahwa cukup benar dalam peristiwa konflik di masyarakat melibatkan lembaga keagamaan seperti majlis ta'lim atau perkumpulan keagamaan, 9 orang atau 14,3% menyatakan bahwa kurang benar dalam peristiwa konflik di masyarakat melibatkan lembaga keagamaan seperti majlis ta'lim atau perkumpulan keagamaan, 7 orang atau 11,1% menyatakan bahwa tidak benar dalam peristiwa konflik di masyarakat melibatkan lembaga keagamaan seperti majlis ta'lim atau perkumpulan keagamaan, dan 6 orang atau 9,5% menyatakan bahwa sangat tidak benar dalam peristiwa konflik di masyarakat melibatkan lembaga keagamaan seperti majlis ta'lim atau perkumpulan keagamaan.

16) Intensitas Keterlibatan Tokoh Agama

Tabel 3.17 Distribusi Frekuensi Intensitas Keterlibatan Tokoh Agama

BUTIR21

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1.00	17	27.0	27.0	27.0
2.00	35	55.6	55.6	82.5
3.00	7	11.1	11.1	93.7
4.00	4	6.3	6.3	100.0
Total	63	100.0	100.0	

Berdasarkan tabel di atas, dari 63 responden yang tersebar di provinsi Kalimantan Selatan dan Tengah, 17 orang atau 27,0% menyatakan bahwa sangat benar aktor utama pemicu atau penggerak konflik di daerah adalah tokoh agama, 35 orang atau 55,6% menyatakan bahwa cukup benar aktor utama pemicu atau penggerak konflik di daerah adalah tokoh agama, 7 orang atau 11,1% menyatakan bahwa kurang benar aktor utama pemicu atau penggerak konflik di daerah adalah tokoh agama, dan 4 orang atau 6,3% menyatakan bahwa tidak benar aktor utama pemicu atau penggerak konflik di daerah adalah tokoh agama.

17) Aktor Utama Pemicu Konflik

Tabel 3.18 Distribusi Frekuensi Aktor Utama Pemicu Konflik

BUTIR22

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1.00	7	11.1	11.1	11.1
2.00	23	36.5	36.5	47.6
3.00	10	15.9	15.9	63.5
4.00	19	30.2	30.2	93.7
5.00	4	6.3	6.3	100.0
Total	63	100.0	100.0	

Berdasarkan tabel di atas, dari 63 responden yang tersebar di provinsi Kalimantan Selatan dan Tengah, 7 orang atau 11,1% menyatakan bahwa sangat benar aktor utama pemicu atau penggerak konflik di daerah memiliki pengaruh yang kuat di masyarakat, 23 orang atau 36,5% menyatakan bahwa cukup benar aktor utama pemicu atau penggerak konflik di daerah memiliki pengaruh yang kuat di masyarakat, 10 orang atau 15,9% menyatakan bahwa kurang benar aktor utama pemicu atau penggerak konflik di daerah memiliki pengaruh yang kuat di masyarakat, 19 orang atau 30,2% menyatakan bahwa tidak benar aktor utama pemicu atau penggerak konflik di daerah memiliki pengaruh yang kuat di masyarakat, dan 4 orang atau 6,3% menyatakan bahwa sangat tidak benar aktor utama pemicu atau penggerak konflik di daerah memiliki pengaruh yang kuat di masyarakat.

18) Aktor Tokoh Agama

Tabel 3.19 Distribusi Frekuensi Aktor Pemicu Konflik Didukung Tokoh Agama

BUTIR23

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1.00	16	25.4	25.4	25.4
2.00	27	42.9	42.9	68.3
3.00	13	20.6	20.6	88.9
4.00	7	11.1	11.1	100.0
Total	63	100.0	100.0	

Berdasarkan tabel di atas, dari 63 responden yang tersebar di provinsi Kalimantan Selatan dan Tengah, 16 orang atau 25,4% menyatakan bahwa sangat benar aktor utama pemicu atau penggerak konflik di daerah didukung oleh tokoh agama, 27 orang atau 42,9% menyatakan bahwa cukup benar aktor utama pemicu atau penggerak konflik di daerah didukung oleh tokoh agama, 13 orang atau 20,6% menyatakan bahwa kurang benar aktor utama pemicu atau penggerak konflik di daerah didukung oleh tokoh agama, dan 7 orang atau 11,1% menyatakan bahwa tidak benar aktor utama pemicu atau penggerak konflik di daerah didukung oleh tokoh agama.

19) Aktor Tokoh Organisasi Keagamaan

Tabel 3.20 Distribusi Frekuensi Aktor Pemicu Konflik Adalah Tokoh Organisasi Keagamaan

BUTIR24

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1.00	11	17.5	17.5	17.5
2.00	34	54.0	54.0	71.4
3.00	12	19.0	19.0	90.5
4.00	6	9.5	9.5	100.0
Total	63	100.0	100.0	

Berdasarkan tabel di atas, dari 63 responden yang tersebar di provinsi Kalimantan Selatan dan Tengah, 11 orang atau 17,5% menyatakan bahwa sangat benar aktor utama pemicu atau penggerak konflik di daerah adalah tokoh organisasi keagamaan, 34 orang atau 54,0% menyatakan bahwa cukup benar aktor utama pemicu atau penggerak konflik di daerah adalah tokoh organisasi keagamaan, 12 orang atau 19,0% menyatakan bahwa kurang benar aktor utama pemicu atau penggerak konflik di daerah adalah tokoh organisasi keagamaan, dan 6 orang atau 9,5% menyatakan bahwa tidak benar aktor utama pemicu atau penggerak konflik di daerah adalah tokoh organisasi keagamaan.

20) Pengetahuan Agama Peserta Konflik

Tabel 3.21 Distribusi Frekuensi Peserta Konflik Memiliki Pengetahuan Agama Yang Luas

BUTIR25

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1.00	11	17.5	17.5	17.5
2.00	28	44.4	44.4	61.9
3.00	12	19.0	19.0	81.0
4.00	10	15.9	15.9	96.8
5.00	2	3.2	3.2	100.0
Total	63	100.0	100.0	

Berdasarkan tabel di atas, dari 63 responden yang tersebar di provinsi Kalimantan Selatan dan Tengah, 11 orang atau 17,5% menyatakan bahwa sangat benar para peserta atau pelaku yang terlibat dalam konflik di daerah memiliki pengetahuan agama yang luas, 28 orang atau 44,4% menyatakan bahwa cukup benar para peserta atau pelaku yang terlibat dalam konflik di daerah memiliki pengetahuan agama yang luas, 12 orang atau 19,0% menyatakan bahwa kurang benar para peserta atau pelaku yang terlibat dalam konflik di daerah memiliki pengetahuan agama yang luas, 10 orang atau 15,9% menyatakan bahwa tidak benar para peserta atau pelaku yang terlibat dalam konflik di daerah memiliki pengetahuan agama yang luas, dan 2 orang atau 3,2% menyatakan bahwa sangat tidak benar para peserta atau pelaku yang terlibat dalam konflik di daerah memiliki pengetahuan agama yang luas.

21) Pengamalan Agama Peserta Konflik

Tabel 3.22 Distribusi Frekuensi Peserta Konflik Mengamalkan Ajaran Agama

BUTIR26

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1.00	11	17.5	17.5	17.5
2.00	27	42.9	42.9	60.3
3.00	10	15.9	15.9	76.2
4.00	11	17.5	17.5	93.7
5.00	4	6.3	6.3	100.0
Total	63	100.0	100.0	

Berdasarkan tabel di atas, dari 63 responden yang tersebar di provinsi Kalimantan Selatan dan Tengah, 11 orang atau 17,5% menyatakan bahwa sangat benar para peserta atau pelaku yang terlibat dalam konflik di daerah mengamalkan ajaran agama, 27 orang atau 42,9% menyatakan bahwa cukup benar para peserta atau pelaku yang terlibat dalam konflik di daerah mengamalkan ajaran agama, 10 orang atau 15,9% menyatakan bahwa kurang benar para peserta atau pelaku yang terlibat dalam konflik di daerah mengamalkan ajaran agama, 11 orang atau 17,5% menyatakan bahwa tidak benar para peserta atau pelaku yang terlibat dalam konflik di daerah mengamalkan ajaran agama, dan 4 orang atau 6,3% menyatakan bahwa sangat tidak benar para peserta atau pelaku yang terlibat dalam konflik di daerah mengamalkan ajaran agama.

22) Perilaku (Akhlak) Peserta Konflik

Tabel 3.23 Distribusi Frekuensi Peserta Konflik Memiliki Akhlak atau Perilaku Yang Baik

BUTIR27

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1.00	11	17.5	17.5	17.5
2.00	24	38.1	38.1	55.6
3.00	16	25.4	25.4	81.0
4.00	10	15.9	15.9	96.8
5.00	2	3.2	3.2	100.0
Total	63	100.0	100.0	

Berdasarkan tabel di atas, dari 63 responden yang tersebar di provinsi Kalimantan Selatan dan Tengah, 11 orang atau 17,5% menyatakan bahwa sangat benar para peserta atau pelaku yang terlibat dalam konflik di daerah memiliki akhlak atau perilaku yang baik, 24 orang atau 38,1% menyatakan bahwa cukup benar para peserta atau pelaku yang terlibat dalam konflik di daerah memiliki akhlak atau perilaku yang baik, 16 orang atau 25,4% menyatakan bahwa kurang benar para peserta atau pelaku yang terlibat dalam konflik di daerah memiliki akhlak atau perilaku yang baik, 10 orang atau 15,9% menyatakan bahwa tidak benar para peserta atau pelaku yang terlibat dalam konflik di daerah memiliki akhlak atau perilaku yang baik, dan 2 orang atau 3,2% menyatakan bahwa sangat tidak benar para peserta atau pelaku yang terlibat dalam konflik di daerah memiliki akhlak atau perilaku yang baik.

23) Keterlibatan Peserta Konflik Dalam Jamaah Pengajian Agama

Tabel 3.24 Distribusi Frekuensi Peserta Konflik Ikut Dalam Jamaah Pengajian Agama

BUTIR28

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1.00	9	14.3	14.3	14.3
2.00	28	44.4	44.4	58.7
3.00	17	27.0	27.0	85.7
4.00	9	14.3	14.3	100.0
Total	63	100.0	100.0	

Berdasarkan tabel di atas, dari 63 responden yang tersebar di provinsi Kalimantan Selatan dan Tengah, 9 orang atau 14,3% menyatakan bahwa sangat benar para peserta atau pelaku konflik di daerah ikut dalam jamaah pengajian agama, 28 orang atau 44,4% menyatakan bahwa cukup benar para peserta atau pelaku konflik di daerah ikut dalam jamaah pengajian agama, 17 orang atau 27,0% menyatakan bahwa kurang benar para peserta atau pelaku konflik di daerah ikut dalam jamaah pengajian agama, dan 9 orang atau 14,3% menyatakan bahwa tidak benar para peserta atau pelaku konflik di daerah ikut dalam jamaah pengajian agama.

24) Kerajinan Beribadah Peserta Konflik

Tabel 3.25 Distribusi Frekuensi Intensitas Rajin Beribadah Peserta Konflik

BUTIR29

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	7	11.1	11.1	11.1
	2.00	29	46.0	46.0	57.1
	3.00	16	25.4	25.4	82.5
	4.00	10	15.9	15.9	98.4
	5.00	1	1.6	1.6	100.0
	Total	63	100.0	100.0	

Berdasarkan tabel di atas, dari 63 responden yang tersebar di provinsi Kalimantan Selatan dan Tengah, 7 orang atau 11,1% menyatakan bahwa sangat benar para peserta atau pelaku konflik di daerah rajin beribadah, 29 orang atau 46,0% menyatakan bahwa cukup benar para peserta atau pelaku konflik di daerah rajin beribadah, 16 orang atau 25,4% menyatakan bahwa kurang benar para peserta atau pelaku konflik di daerah rajin beribadah, 10 orang atau 15,9% menyatakan bahwa tidak benar para peserta atau pelaku konflik di daerah rajin beribadah, dan 1 orang atau 1,6% menyatakan bahwa sangat tidak benar para peserta atau pelaku konflik di daerah rajin beribadah.

25) Peran Ceramah Agama

Tabel 3.26 Distribusi Frekuensi Pemicu Konflik Adalah Ceramah Agama

BUTIR30

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	14	22.2	22.2	22.2
	2.00	35	55.6	55.6	77.8
	3.00	10	15.9	15.9	93.7
	4.00	4	6.3	6.3	100.0
	Total	63	100.0	100.0	

Berdasarkan tabel di atas, dari 63 responden yang tersebar di provinsi Kalimantan Selatan dan Tengah, 14 orang atau 22,2% menyatakan bahwa sangat benar media atau sumber informasi pemicu terjadinya konflik di daerah berasal dari kegiatan ceramah agama, 35 orang atau 55,6% menyatakan bahwa cukup benar media atau sumber informasi pemicu terjadinya konflik di daerah berasal dari kegiatan ceramah agama, 10 orang atau 15,9% menyatakan bahwa kurang benar media atau sumber informasi pemicu terjadinya konflik di daerah berasal dari kegiatan ceramah agama, dan 4 orang atau 6,3% menyatakan bahwa tidak benar media atau sumber informasi pemicu terjadinya konflik di daerah berasal dari kegiatan ceramah agama.

26) Peran Media Cetak Keagamaan

Tabel 3.27 Distribusi Frekuensi Konflik Berasal Dari Media Cetak Keagamaan

BUTIR31

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1.00	9	14.3	14.3	14.3
2.00	26	41.3	41.3	55.6
3.00	11	17.5	17.5	73.0
4.00	16	25.4	25.4	98.4
5.00	1	1.6	1.6	100.0
Total	63	100.0	100.0	

Berdasarkan tabel di atas, dari 63 responden yang tersebar di provinsi Kalimantan Selatan dan Tengah, 9 orang atau 14,3% menyatakan bahwa sangat benar media atau sumber informasi pemicu terjadinya konflik di daerah berasal dari media cetak keagamaan (bulletin, leaflet, dan lainnya), 26 orang atau 41,3% menyatakan bahwa cukup benar media atau sumber informasi pemicu terjadinya konflik di daerah berasal dari media cetak keagamaan (bulletin, leaflet, dan lainnya), 11 orang atau 17,5% menyatakan bahwa kurang benar media atau sumber informasi pemicu terjadinya konflik di daerah berasal dari media cetak keagamaan (bulletin, leaflet, dan lainnya), 16 orang atau 25,4% menyatakan bahwa tidak benar media atau sumber informasi pemicu terjadinya konflik di daerah berasal dari media cetak keagamaan (bulletin, leaflet, dan lainnya), dan 1 orang atau 1,6% menyatakan bahwa sangat tidak benar media atau sumber informasi pemicu terjadinya konflik di daerah berasal dari media cetak keagamaan (bulletin, leaflet, dan lainnya).

b. Integrasi

1) Pilihan Partai Berdasarkan Agama

Tabel 3.28 Distribusi Frekuensi Memilih Partai Berdasarkan Agama

BUTIR9

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1.00	5	7.9	7.9	7.9
2.00	16	25.4	25.4	33.3
3.00	5	7.9	7.9	41.3
4.00	15	23.8	23.8	65.1
5.00	22	34.9	34.9	100.0
Total	63	100.0	100.0	

Berdasarkan tabel di atas, dari 63 responden yang tersebar di provinsi Kalimantan Selatan dan Tengah, 5 orang atau 7,9% menyatakan bahwa sangat benar memilih partai politik yang berlandaskan agama (partai agama), 16 orang atau 25,4% menyatakan bahwa cukup benar memilih partai politik yang berlandaskan agama (partai agama), 5 orang atau 7,9% menyatakan bahwa kurang benar memilih partai politik yang berlandaskan agama (partai agama), 15 orang atau 23,8% menyatakan bahwa tidak benar memilih partai politik yang berlandaskan agama (partai agama), dan 22 orang atau 34,9% menyatakan bahwa sangat tidak benar memilih partai politik yang berlandaskan agama (partai agama).

2) Keyakinan Perintah Agama

Tabel 3.29 Distribusi Frekuensi Keyakinan Memilih Wakil Rakyat Yang Seagama Adalah Perintah Agama

BUTIR10

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1.00	4	6.3	6.3	6.3
2.00	4	6.3	6.3	12.7
3.00	4	6.3	6.3	19.0
4.00	14	22.2	22.2	41.3
5.00	37	58.7	58.7	100.0
Total	63	100.0	100.0	

Berdasarkan tabel di atas, dari 63 responden yang tersebar di provinsi Kalimantan Selatan dan Tengah, 4 orang atau 6,3% menyatakan bahwa sangat benar memilih wakil rakyat (anggota DPR/DPRD/DPD) yang seagama adalah perintah agama, 4 orang atau 6,3% menyatakan bahwa cukup benar memilih wakil rakyat (anggota DPR/DPRD/DPD) yang seagama adalah perintah agama, 4 orang atau 6,3% menyatakan bahwa kurang benar memilih wakil rakyat (anggota DPR/DPRD/DPD) yang seagama adalah perintah agama, 14 orang atau 22,2% menyatakan bahwa tidak benar memilih wakil rakyat (anggota DPR/DPRD/DPD) yang seagama adalah perintah agama, dan 37 orang atau 58,7% menyatakan bahwa sangat tidak benar memilih wakil rakyat (anggota DPR/DPRD/DPD) yang seagama adalah perintah agama.

3) Keyakinan Memperjuangkan Kepentingan Agama

Tabel 3.30 Distribusi Frekuensi Keyakinan Memilih Wakil Rakyat Yang Seagama Dapat Memperjuangkan Kepentingan Agama

BUTIR11

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	4	6.3	6.3	6.3
	2.00	5	7.9	7.9	14.3
	3.00	5	7.9	7.9	22.2
	4.00	27	42.9	42.9	65.1
	5.00	22	34.9	34.9	100.0
	Total	63	100.0	100.0	

Berdasarkan tabel di atas, dari 63 responden yang tersebar di provinsi Kalimantan Selatan dan Tengah, 4 orang atau 6,3% menyatakan bahwa sangat benar wakil rakyat (anggota DPR/DPRD/DPD) yang seagama diyakini dapat memperjuangkan kepentingan agama, 5 orang atau 7,9% menyatakan bahwa cukup benar wakil rakyat (anggota DPR/DPRD/DPD) yang seagama diyakini dapat memperjuangkan kepentingan agama, 5 orang atau 7,9% menyatakan bahwa kurang benar wakil rakyat (anggota DPR/DPRD/DPD) yang seagama diyakini dapat memperjuangkan kepentingan agama, 27 orang atau 42,9% menyatakan bahwa tidak benar wakil rakyat (anggota DPR/DPRD/DPD) yang seagama diyakini dapat memperjuangkan kepentingan agama, dan 22 orang atau 34,9% menyatakan bahwa sangat tidak benar wakil rakyat (anggota DPR/DPRD/DPD) yang seagama diyakini dapat memperjuangkan kepentingan agama.

4) Keyakinan Memperjuangkan Kesejahteraan Rakyat

Tabel 3.31 Distribusi Frekuensi Keyakinan Wakil Rakyat Yang Seagama Dapat Memperjuangkan Kesejahteraan Rakyat

BUTIR12

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	3	4.8	4.8	4.8
	2.00	5	7.9	7.9	12.7
	3.00	9	14.3	14.3	27.0
	4.00	34	54.0	54.0	81.0
	5.00	12	19.0	19.0	100.0
	Total	63	100.0	100.0	

Berdasarkan tabel di atas, dari 63 responden yang tersebar di provinsi Kalimantan Selatan dan Tengah, 3 orang atau 4,8% menyatakan bahwa sangat benar wakil rakyat (anggota DPR/DPRD/DPD) yang seagama diyakini dapat memperjuangkan kesejahteraan rakyat, 5 orang atau 7,9% menyatakan bahwa cukup benar wakil rakyat (anggota DPR/DPRD/DPD) yang seagama diyakini dapat memperjuangkan kesejahteraan rakyat, 9 orang atau 14,3% menyatakan bahwa kurang benar wakil rakyat (anggota DPR/DPRD/DPD) yang seagama diyakini dapat memperjuangkan kesejahteraan rakyat, 34 orang atau 54,0% menyatakan bahwa tidak benar wakil rakyat (anggota DPR/DPRD/DPD) yang seagama diyakini dapat memperjuangkan kesejahteraan

rakyat, dan 12 orang atau 19,0% menyatakan bahwa sangat tidak benar wakil rakyat (anggota DPR/DPRD/DPD) yang seagama diyakini dapat memperjuangkan kesejahteraan rakyat.

5) Keyakinan Kejujuran (Amanah)

Tabel 3.32 Distribusi Frekuensi Keyakinan Wakil Rakyat Yang Seagama Lebih Jujur dan Amanah

BUTIR13

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1.00	1	1.6	1.6	1.6
2.00	5	7.9	7.9	9.5
3.00	8	12.7	12.7	22.2
4.00	38	60.3	60.3	82.5
5.00	11	17.5	17.5	100.0
Total	63	100.0	100.0	

Berdasarkan tabel di atas, dari 63 responden yang tersebar di provinsi Kalimantan Selatan dan Tengah, 1 orang atau 1,6% menyatakan bahwa sangat benar wakil rakyat (anggota DPR/DPRD/DPD) yang seagama diyakini lebih jujur dan amanah, 5 orang atau 7,9% menyatakan bahwa cukup benar wakil rakyat (anggota DPR/DPRD/DPD) yang seagama diyakini lebih jujur dan amanah, 8 orang atau 12,7% menyatakan bahwa kurang benar wakil rakyat (anggota DPR/DPRD/DPD) yang seagama diyakini lebih jujur dan amanah, 38 orang atau 60,3% menyatakan bahwa tidak benar wakil rakyat (anggota DPR/DPRD/DPD) yang seagama diyakini lebih jujur dan amanah, dan 11 orang atau 17,5% menyatakan bahwa sangat tidak benar wakil rakyat (anggota DPR/DPRD/DPD) yang seagama diyakini lebih jujur dan amanah.

6) Keyakinan Agama Sebagai Perikat Integrasi

Tabel 3.33 Distribusi Frekuensi Keyakinan Faktor Agama Merupakan Perikat Integrasi

BUTIR32

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1.00	1	1.6	1.6	1.6
2.00	5	7.9	7.9	9.5
3.00	4	6.3	6.3	15.9
4.00	24	38.1	38.1	54.0
5.00	29	46.0	46.0	100.0
Total	63	100.0	100.0	

Berdasarkan tabel di atas, dari 63 responden yang tersebar di provinsi Kalimantan Selatan dan Tengah, 1 orang atau 1,6% menyatakan bahwa sangat benar faktor agama merupakan perikat integrasi (penyatuan sosial) yang dapat merukunkan masyarakat setelah (pasca) pemilu 2019 di

daerah, 5 orang atau 7,9% menyatakan bahwa cukup benar faktor agama merupakan perekat integrasi (penyatuan sosial) yang dapat merukunkan masyarakat setelah (pasca) pemilu 2019 di daerah, 4 orang atau 6,3% menyatakan bahwa kurang benar faktor agama merupakan perekat integrasi (penyatuan sosial) yang dapat merukunkan masyarakat setelah (pasca) pemilu 2019 di daerah, 24 orang atau 38,1% menyatakan bahwa tidak benar faktor agama merupakan perekat integrasi (penyatuan sosial) yang dapat merukunkan masyarakat setelah (pasca) pemilu 2019 di daerah, dan 29 orang atau 46,0% menyatakan bahwa sangat tidak benar faktor agama merupakan perekat integrasi (penyatuan sosial) yang dapat merukunkan masyarakat setelah (pasca) pemilu 2019 di daerah.

7) Keyakinan Tokoh Agama Sebagai Perekat Integrasi

Tabel 3.34 Distribusi Frekuensi Keyakinan Tokoh Agama Merupakan Perekat Integrasi

BUTIR33

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1.00	1	1.6	1.6	1.6
3.00	2	3.2	3.2	4.8
4.00	25	39.7	39.7	44.4
5.00	35	55.6	55.6	100.0
Total	63	100.0	100.0	

Berdasarkan tabel di atas, dari 63 responden yang tersebar di provinsi Kalimantan Selatan dan Tengah, 1 orang atau 1,6% menyatakan bahwa sangat benar tokoh agama berperan penting sebagai perekat integrasi (penyatuan sosial) yang dapat merukunkan masyarakat setelah (pasca) pemilu 2019 di daerah, 2 orang atau 3,2% menyatakan bahwa kurang benar tokoh agama berperan penting sebagai perekat integrasi (penyatuan sosial) yang dapat merukunkan masyarakat setelah (pasca) pemilu 2019 di daerah, 25 orang atau 39,7% menyatakan bahwa tidak benar tokoh agama berperan penting sebagai perekat integrasi (penyatuan sosial) yang dapat merukunkan masyarakat setelah (pasca) pemilu 2019 di daerah, dan 35 orang atau 55,6% menyatakan bahwa sangat tidak benar tokoh agama berperan penting sebagai perekat integrasi (penyatuan sosial) yang dapat merukunkan masyarakat setelah (pasca) pemilu 2019 di daerah.

8) Keyakinan Tokoh Agama Sebagai Pioner Kerukunan

Tabel 3.35 Distribusi Frekuensi Keyakinan Tokoh Agama Merupakan Pionir Kerukunan di Masyarakat

BUTIR34

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1.00	1	1.6	1.6	1.6
2.00	4	6.3	6.3	7.9
4.00	28	44.4	44.4	52.4
5.00	30	47.6	47.6	100.0
Total	63	100.0	100.0	

Berdasarkan tabel di atas, dari 63 responden yang tersebar di provinsi Kalimantan Selatan dan Tengah, 1 orang atau 1,6% menyatakan bahwa sangat benar terwujudnya kerukunan di masyarakat pada setelah (pasca) pemilu 2019 diawali dari peran tokoh agama, 4 orang atau 6,3% menyatakan bahwa cukup benar terwujudnya kerukunan di masyarakat pada setelah (pasca) pemilu

2019 diawali dari peran tokoh agama, 28 orang atau 44,4% menyatakan bahwa tidak benar terwujudnya kerukunan di masyarakat pada setelah (pasca) pemilu 2019 diawali dari peran tokoh agama, dan 30 orang atau 47,6% menyatakan bahwa sangat tidak benar terwujudnya kerukunan di masyarakat pada setelah (pasca) pemilu 2019 diawali dari peran tokoh agama.

9) Peranan Tokoh Agama Dalam Mewujudkan Kerukunan

Tabel 3.36 Distribusi Frekuensi Peranan Tokoh Agama Dalam Mewujudkan Kerukunan

BUTIR35

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2.00	3	4.8	4.8	4.8
4.00	30	47.6	47.6	52.4
5.00	30	47.6	47.6	100.0
Total	63	100.0	100.0	

Berdasarkan tabel di atas, dari 63 responden yang tersebar di provinsi Kalimantan Selatan dan Tengah, 3 orang atau 4,8% menyatakan bahwa cukup benar tokoh agama berperan besar dalam mewujudkan kerukunan di masyarakat setelah (pasca) pemilu 2019, 30 orang atau 47,6% menyatakan bahwa tidak benar tokoh agama berperan besar dalam mewujudkan kerukunan di masyarakat setelah (pasca) pemilu 2019, dan 30 orang atau 47,6% menyatakan bahwa sangat tidak benar tokoh agama berperan besar dalam mewujudkan kerukunan di masyarakat setelah (pasca) pemilu 2019.

10) Keyakinan Ceramah Agama Sebagai Perekat Integrasi

Tabel 3.37 Distribusi Frekuensi Keyakinan Ceramah Agama Merupakan Perekat Integrasi

BUTIR36

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1.00	1	1.6	1.6	1.6
3.00	2	3.2	3.2	4.8
4.00	34	54.0	54.0	58.7
5.00	26	41.3	41.3	100.0
Total	63	100.0	100.0	

Berdasarkan tabel di atas, dari 63 responden yang tersebar di provinsi Kalimantan Selatan dan Tengah, 1 orang atau 1,6% menyatakan bahwa sangat benar ceramah dan atau khutbah agama berperan besar dalam mewujudkan kerukunan di masyarakat setelah (pasca) pemilu 2019, 2 orang atau 3,2% menyatakan bahwa kurang benar ceramah dan atau khutbah agama berperan besar dalam mewujudkan kerukunan di masyarakat setelah (pasca) pemilu 2019, 34 orang atau 54,0% menyatakan bahwa tidak benar ceramah dan atau khutbah agama berperan besar dalam mewujudkan kerukunan di masyarakat setelah (pasca) pemilu 2019, dan 26 orang atau 41,3% menyatakan bahwa sangat tidak benar ceramah dan atau khutbah agama berperan besar dalam mewujudkan kerukunan di masyarakat setelah (pasca) pemilu 2019.

11) Intensitas Hubungan Umat Beragama

Tabel 3.38 Distribusi Frekuensi Intensitas Hubungan Antar Umat Beragama

BUTIR37

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1.00	1	1.6	1.6	1.6
4.00	37	58.7	58.7	60.3
5.00	25	39.7	39.7	100.0
Total	63	100.0	100.0	

Berdasarkan tabel di atas, dari 63 responden yang tersebar di provinsi Kalimantan Selatan dan Tengah, 1 orang atau 1,6% menyatakan bahwa sangat benar hubungan antar umat beragama terjalin dengan baik di masyarakat setelah (pasca) pemilu 2019, 37 orang atau 58,7% menyatakan bahwa tidak benar hubungan antar umat beragama terjalin dengan baik di masyarakat setelah (pasca) pemilu 2019, dan 25 orang atau 39,7% menyatakan bahwa sangat tidak benar hubungan antar umat beragama terjalin dengan baik di masyarakat setelah (pasca) pemilu 2019.

12) Keyakinan Tempat Ibadah Sebagai Perikat Integrasi

Tabel 3.39 Distribusi Frekuensi Keyakinan Tempat Ibadah Merupakan Perikat Integrasi

BUTIR38

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1.00	1	1.6	1.6	1.6
3.00	3	4.8	4.8	6.3
4.00	37	58.7	58.7	65.1
5.00	22	34.9	34.9	100.0
Total	63	100.0	100.0	

Berdasarkan tabel di atas, dari 63 responden yang tersebar di provinsi Kalimantan Selatan dan Tengah, 1 orang atau 1,6% menyatakan bahwa sangat benar tempat ibadah berperan besar dalam mewujudkan kerukunan di masyarakat setelah (pasca) pemilu 2019, 3 orang atau 4,8% menyatakan bahwa kurang benar tempat ibadah berperan besar dalam mewujudkan kerukunan di masyarakat setelah (pasca) pemilu 2019, 37 orang atau 58,7% menyatakan bahwa tidak benar tempat ibadah berperan besar dalam mewujudkan kerukunan di masyarakat setelah (pasca) pemilu 2019, dan 22 orang atau 34,9% menyatakan bahwa sangat tidak benar tempat ibadah berperan besar dalam mewujudkan kerukunan di masyarakat setelah (pasca) pemilu 2019.

13) Intensitas Kerukunan Pasca Pemilu

Tabel 3.40 Distribusi Frekuensi Intensitas Kerukunan Masyarakat Pasca Pemilu

BUTIR39

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	3	4.8	4.8	4.8
	2.00	1	1.6	1.6	6.3
	3.00	7	11.1	11.1	17.5
	4.00	39	61.9	61.9	79.4
	5.00	13	20.6	20.6	100.0
	Total	63	100.0	100.0	

Berdasarkan tabel di atas, dari 63 responden yang tersebar di provinsi Kalimantan Selatan dan Tengah, 3 orang atau 4,8% menyatakan bahwa sangat benar kerukunan dalam masyarakat lebih kuat terjalin setelah (pasca) pemilu 2019, 1 orang atau 1,6% menyatakan bahwa cukup benar kerukunan dalam masyarakat lebih kuat terjalin setelah (pasca) pemilu 2019, 7 orang atau 11,1% menyatakan bahwa kurang benar kerukunan dalam masyarakat lebih kuat terjalin setelah (pasca) pemilu 2019, 39 orang atau 61,9% menyatakan bahwa tidak benar kerukunan dalam masyarakat lebih kuat terjalin setelah (pasca) pemilu 2019, dan 13 orang atau 20,6% menyatakan bahwa sangat tidak benar kerukunan dalam masyarakat lebih kuat terjalin setelah (pasca) pemilu 2019.

14) Hubungan Konflik Bernuansa Religius Politik Dengan Integrasi

Tabel 3.41 Hubungan Konflik Bernuansa Religius-Politik Dengan Proses Integrasi Bangsa Pasca Pemilu 2019 Di Kalimantan

Correlations

		KONFLIK	INTEGRASI
KONFLIK	Pearson Correlation	1	.268*
	Sig. (2-tailed)		.034
	N	63	63
INTEGRASI	Pearson Correlation	.268*	1
	Sig. (2-tailed)	.034	
	N	63	63

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Berdasarkan tabel output di atas diketahui nilai signifikansi antara faktor konflik bernuansa religius politik (X) dengan proses integrasi bangsa pasca pemilu 2019 di Kalimantan (Y) adalah sebesar $0,034 < 0,05$, yang berarti terdapat korelasi yang signifikan antara variabel faktor konflik dengan proses integrasi dengan taraf signifikansi sebesar 5%. Artinya, faktor konflik memiliki hubungan simultan yang signifikan terhadap proses integrasi bangsa pasca pemilu 2019 di Kalimantan sebesar 3,4%, sedangkan 96,6% lainnya dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian.

15) Hubungan (Pengaruh) Sub-Sub Variabel Konflik

Tabel 3.42 Hubungan Subvariabel Eskalasi dan Akibat Konflik, Faktor Pemicu Konflik, Faktor Utama Penyebab Konflik, Keterlibatan Unsur Agama, Aktor Pemicu/Penggerak, Dan Peserta Konflik Masing-Masing Terhadap Variabel Konflik Bernuansa Religius-Politik

Correlations

		KONFLIK	SUBKONFLIK 1	SUBKONFLIK 2	SUBKONFLIK 3	SUBKONFLIK 4	SUBKONFLIK 5	SUBKONFLIK 6
KONFLIK	Pearson Correlation	1	.529**	.664**	.481**	.867**	.874**	.862**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	63	63	63	63	63	63	63
SUBKONFLIK1	Pearson Correlation	.529**	1	.260*	.211	.303	.369**	.485**
	Sig. (2-tailed)	.000		.039	.096	.016	.003	.000
	N	63	63	63	63	63	63	63
SUBKONFLIK2	Pearson Correlation	.664**	.260*	1	.215	.434**	.468**	.540**
	Sig. (2-tailed)	.000	.039		.091	.000	.000	.000
	N	63	63	63	63	63	63	63
SUBKONFLIK3	Pearson Correlation	.481**	.211	.215	1	.479**	.284	.322*
	Sig. (2-tailed)	.000	.096	.091		.000	.024	.010
	N	63	63	63	63	63	63	63
SUBKONFLIK4	Pearson Correlation	.867**	.303	.434**	.479**	1	.675**	.592**
	Sig. (2-tailed)	.000	.016	.000	.000		.000	.000
	N	63	63	63	63	63	63	63
SUBKONFLIK5	Pearson Correlation	.874**	.369**	.468**	.284	.675**	1	.827**
	Sig. (2-tailed)	.000	.003	.000	.024	.000		.000
	N	63	63	63	63	63	63	63
SUBKONFLIK6	Pearson Correlation	.862**	.485**	.540**	.322*	.592**	.827**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.010	.000	.000	
	N	63	63	63	63	63	63	63

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Berdasarkan tabel output di atas diketahui nilai signifikansi antara subvariabel eskalasi dan akibat konflik, faktor pemicu konflik, faktor utama penyebab konflik, keterlibatan unsur agama, aktor pemicu/penggerak, dan peserta konflik masing-masing terhadap variabel konflik bernuansa religius-politik adalah sebesar $0,000 < 0,001$, artinya terdapat hubungan yang signifikan antara subvariabel konflik dengan variabel konflik dengan taraf signifikansi sebesar 1%.

16) Hubungan (Perekat) Sub-Sub Variabel Integrasi

Tabel 3.43 Hubungan Subvariabel Faktor Perekat Integrasi dan Proses Integrasi Terhadap Variabel Integrasi Bernuansa Religius-Politik

Correlations

		INTEGRASI	SUBINTEGRA SI1	SUBINTEGRA SI2
INTEGRASI	Pearson Correlation	1	.990**	.687**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000
	N	63	63	63
SUBINTEGRASI1	Pearson Correlation	.990**	1	.580**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000
	N	63	63	63
SUBINTEGRASI2	Pearson Correlation	.687**	.580**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	
	N	63	63	63

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Berdasarkan tabel output di atas diketahui nilai signifikansi antara subvariabel faktor perekat dan proses integrasi masing-masing terhadap variabel integrasi adalah sebesar $0,000 <$

0,001, artinya terdapat hubungan yang signifikan antara subvariabel integrasi dengan variabel integrasi dengan taraf signifikansi sebesar 1%

2. Deskripsi dan Analisis Data Kualitatif

a. Konflik

1) Eskalasi dan Pengaruh Konflik

Pada saat Pemilu maupun pasca Pemilu 2019 di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah di beberapa daerah menunjukkan terjadinya konflik. Konflik lebih terasa di kalangan generasi muda, sehingga mengakibatkan kerenggangan sosial. Tumbuh kecurigaan dan ketidakharmonisan sosial. Sebagaimana dijelaskan oleh Nurifansyah berikut ini.

“Pada Pemilu 2019 yang lalu memang pada proses awalnya ada terasa mulai dari kampanye, utamanya di generasi muda atau komunitas. Salah satu contohnya komunitas olahraga, bersepeda. Yang tadinya akrab, setelah adanya pemilihan presiden jadi saling mencurigai satu sama lain, sampai sekarang masih miskomunikasi”

Konflik terjadi dari tingkat RT, RW, desa, kecamatan, bahkan kabupaten. Luasnya eskalasi konflik ini dipengaruhi oleh intensitas konflik pada masing-masing daerah. Meluasnya wilayah konflik tersebut diakibatkan oleh pengaruh media sosial (medsos) yang belakangan ini semakin marak di masyarakat. Berikut dipaparkan oleh Husnul.

“Konflik pada saat pemilu itu biasanya sering terjadi seperti di RT, di desa, bahkan ditingkat-tingkat pemerintahan diatas seperti kecamatan, kabupaten, dan pemerintahan lainnya juga sering terjadi hal-hal tersebut. Kalau dilihat-lihat juga bahwa rata-rata konflik tersebut menyebar hampir diseluruh kecamatan.”

Pengaruh konflik Pemilu 2019 sangat berkurang seiring dengan berakhirnya pesta demokrasi tersebut, serta menjelang Pemilukada di masing-masing daerah. Hal ini disebabkan energi konflik bergeser dari objek Pemilu 2019 ke objek Pemilukada, sebagaimana dipaparkan Ardiansyah sebagai berikut.

“Untuk sejauh ini dampak dari konflik tersebut memang tidak terlalu signifikan karena saat acara pemilu tersebut berakhir maka konflik tersebut juga lumayan meredam dan kehidupan mereka pun kembali seperti biasanya.”

Informan lain (Husnul) mengemukakan pengaruh konflik yang terjadi berikut ini.

“Sedikit banyaknya itu berpengaruh pada kehidupan sosial masyarakat. Dampaknya seperti sedikit terganggunya hubungan sosial antar masyarakat, juga berdampak kearah keagamaan dan lain sebagainya”.

Terganggunya hubungan sosial kadang-kadang dikaitkan dengan aspek keagamaan, misalnya sikap tidak menerima penceramah yang berbeda pilihan politik, seperti yang dikemukakan seorang informan berikut ini.

Kalau keluarga tidak, cuman personal seperti teman-teman agak menjauh dari kita. Bahkan ada teman sesama penceramah, ketika ulun hadir, terang-terangan dia menyebut bahwa orang yang becaleg itu ustadz yang tidak terpakai di masyarakat. Jadi ulun nih kan membaca, naudzubillah, tapi ulun tidak bereaksi. Biarkan lah itu pendapat mereka kan, hanya Allah yang tahu bagaimana kita di masyarakat kan. Jadi tidak termakan hasutan itu ulun saat itu, apa lagi ulun sebagai mantan penyuluh santai aja menanggapi kan.

2) Faktor Pemicu Konflik

Pemicu konflik pada dasarnya adalah faktor perbedaan pilihan politik baik terhadap calon presiden-wakil presiden maupun terhadap calon anggota legislatif (DPR, DPRD, DPD). Pilihan terhadap calon presiden-wakil presiden dan pilihan terhadap partai politik pada komunitas tertentu seringkali dikaitkan dengan politik identitas, terutama perbedaan agama. Hal ini dikemukakan Hafidah berikut ini.

Faktor pemicu konflik tersebut yaitu karena adanya gesekan-gesekan pada masalah keagamaan yang bukan hanya terjadi pada saat Pemilu 2019 kemaren saja, melainkan hampir selalu terjadi di setiap Pemilu. Sebenarnya di dadalam konflik tersebut juga ada faktor lain yang menyeret agama. Seperti contohnya faktor politik yang akhirnya membawa-bawa masalah keagamaan.

Faktor militansi keagamaan memegang peranan penting dalam memperkuat intensitas konflik terutama pada daerah-daerah masyarakat majemuk. Seperti dipaparkan oleh informan M. Ridwan Sardani seorang aparatur sipil negara di Kementrian Agama kabupaten Pulang Pisau.

Walaupun disini mayoritas masyarakatnya beragama Kristen, namun tetap eskalasi tekait dengan pemilu dominan di keagamaan itu tinggi karena begitu Muslimnya minoritas atau kurang dari 20 persen maka melitansi itu pun juga tinggi. Mereka berusaha memperjuangkannya agar pilihan mereka bisa berhasil dengan cara tidak adanya otak-atik lagi. Disisi lain juga marena merasa mayoritasnya ada di agama lain maka agama yang lain juga berkata pastinya pilihan mereka menjadi pemenang. Akhirnya disana juga ada kecenderungan permainan dalam kecurangan dan itulah yang dijaga oleh masyarakat yang minoritas yang diharapkan masyarakat yang mayoritas. Biasanya karena ada beberapa kali pemilu, masyarakat yang mayoritas itu menguasai beberapa perangkat dalam pemilihan penyelenggaraan maka mereka bermain disana. Yang mana artinya disini ada pengelompokan keagamaan yang terjadi adanya apiliasi politik antara dua agama yang mana juga melibatkan emosi keagamaan didalamnya.

Faktor keagamaan memang agak lebih dominan dalam terciptanya konflik ini karena militansi agama ini kuat oleh masyarakat Muslim yan minoritas maka biasanya tokoh-tokoh agama itu berusa merumuskan cara agar masyarakat itu mengubah pola pikirnya bahwa pilihan politik itu bukan berarti konflik keagamaan. Disini mereka juga berusaha agar bisa menarik masyarakat yang dominan agar mengetahui bahwa pilihan itu bukan dari pilihan keagamaan tapi menjadi pilihan politik saja.

3) Keterlibatan Unsur-Unsur Agama

Unsur-unsur agama baik dari aspek organisasi keagamaan, lembaga keagamaan, tempat ibadah, tokoh agama, maupun partai politik berbasis keagamaan turut berperan dalam proses konflik pada Pemilu 2019.

Peran organisasi keagamaan secara institusional dan formal memang tidak berperan dalam fenomena konflik, namun secara perorangan yang merefresentasikan organisasi keagamaan tertentu cukup berperan terutama di daerah-daerah tertentu. Hal ini bisa dipahami mengingat pilihan-pilihan politik tertentu terkait dengan politik identitas yang ditangkap oleh masyarakat terutama di akar rumput. Sebagaimana dijelaskan informan berikut ini.

“Jelas ada sekali peran organisasi-organisasi keagamaan dalam proses konflik tersebut. Karena ada beberapa dari anggota mereka yang juga ikut terjun kedalam hal politik bisa seperti menyarankan masyarakat untuk lebih mendukung salah satu calon atau bahkan sedikit menjelek-jelekan calon lainnya dan membagus-baguskan calon tertentu”.

Di samping organisasi keagamaan, faktor lembaga keagamaan sebagai unsur keagamaan juga cukup berperan dalam situasi konflik. Melalui lembaga-lembaga keagamaan seperti majlis ta’lim dan kelompok pengajian, terjadi proses interaksi dan komunikasi intensif antar warga komunitas dalam atmosfer emosi keagamaan. Seorang informan mengemukakan hal ini sebagai berikut. “Lembaga keagamaan pun di daerah sini juga ikut terseret dalam konflik tersebut dan faktornya pun sama karena adanya perbedaan pilihan atau ada salah satu calon yang lebih di unggulkan”.

Informan lain (Hadiru) mengemukakan, “tidak diragukan lagi bahwa hampir semua lembaga keagamaan ikut terseret dalam proses konflik tersebut yang mana biasanya disana dimasuki oleh para calon-calon wakil rakyat yang mengikuti lembaga tertentu dengan cara meminta tolong dengan masyarakat-masyarakat disana”.

Tempat ibadah juga memiliki peran dalam proses sosialisasi politik secara tersembunyi melalui proses interaksi dan komunikasi secara individual. Melalui tempat ibadahlah para jamaah juga menjalin emosi keagamaan. Hal ini dikemukakan informan (Hafidah), “ untuk tempat-tempat ibadah juga memiliki peran yang cukup berpengaruh didalam konflik tersebut. Contohnya seperti adanya semacam sosialisasi, kampanye, rasa emosi atau ketidaksenangan terhadap kelompok lain yang dimasukkan didalam tempat ibadah tersebut” .

Seorang informan (Syarwandi) mengemukakan hal serupa bahwa, “untuk tempat ibadah pun juga ikut berperan didalam konflik tersebut karena yang sebenarnya fungsi tempat ibadah adalah untuk beribadah namun ada beberapa orang yang malah menggunakannya untuk berinteraksi membicarakan masalah-masalah lain seperti masalah pemilu tersebut”.

4) Peran Tokoh Agama

Tidak diragukan lagi, tokoh-tokoh agama memiliki peran dalam setiap dinamika sosial, baik dalam proses konflik maupun integrasi. Dalam situasi masyarakat paternalistik dengan kultur patron-klien yang masih dominan di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, maka peran tokoh agama sangat menentukan. Fenomena ini dikemukakan informan (Sardani) sebagai berikut.

Bisanya di daerah tertentu peran tokoh agama lebih dominan terlibat dalam konflik tersebut daripada tokoh masyarakat karena disini masalah masyarakatnya lebih dominan di masalah kekeluargaan makanya jika ingin menyelesaikan suatu masalah itu lebih sulit jika melibatkan tokoh masyarakat saja jika tanpa keagamaan. Pada dasarnya tokoh agama tidak menentukan siapa pilihan calon yang akan dipilih namun secara panggilan keagamaan dan emosi keagamaan itu yang menyatukan antar keluarga.

Hal senada dikemukakan Syarwandi, namun hal tersebut lebih dilatarbelakangi oleh wawasan politik dan keagamaan dari tokoh agama bersangkutan.

Kadang ada diantaranya tokoh agama yang memang pehamannya tentang politik didapat dari diri pribadi mereka sendiri yang sebenarnya mungkin mereka juga belum terlalu paham dengan masalah itu sehingga membuat dia menjadi lebih memanas-manasi salah satu pihak sehingga terjadinya konflik tersebut. Mungkin ia melakukan itu karena tidak mau menerima masukan orang lain, apa kata beliau, apa perilaku beliau, apa dari arahan beliau itu yang mau mereka dikerjakan artinya para masyarakat itu nurut saja dengan beliau walaupun belum tentu benar. Yang bisa disebut bahwa beberapa masyarakat disini memang patuh atau taat kepada tokoh agama tertentu.

5) Karakteristik Sosial Peserta (Pengikut) Konflik

Peserta atau pengikut konflik ada person-person yang terlibat dalam proses konflik sebagai basis massa di arena konflik. Pada umumnya mereka berasal dari kalangan bawah yang terseret dalam arus konflik.

Peserta konflik dalam Pemilu 2019 berasal dari berbagai kalangan tertentu, namun dari segi karakteristik keberagaman mereka tergolong sebagai kelompok awam dari segi pengetahuan keagamaan dan politik. Mereka memiliki militansi yang tinggi dan mudah digerakkan dengan membakar emosi keagamaan oleh tokoh agama tertentu demi kepentingan politik. Hal ini dikemukakan informan (Syarwandi) di bawah ini.

Kalau dari yang dilihat bahwa para peserta yang terlibat dalam konflik tersebut memang agak kurang dari segi ilmu keagamaannya sehingga orang akan lebih mudah memicu terjadinya konflik pada mereka. Para pemudalah yang banyak ikut terseret konflik, ibu-ibu pun juga ikut terlibat. Biasanya para pemuda yang ambisinya naik itu akan sangat kuat dan tidak tertahan lagi. Mereka akan langsung melakukan apa yang disuruhkan oleh orang yang menjadi panutannya.

Hal senada juga dikemukakan oleh informan (Sardani) sebagai berikut, "kalau untuk di daerah sini yang minoritas Islam maka karakteristik masyarakatnya juga memiliki pengetahuan agama yang minim, kebanyakan dari mereka juga adalah Muallaf sehingga posisi ilmu keagamaannya itu juga masih rendah"

6) Peran Media Informasi

Media informasi terutama media sosial (medsos) sangat besar berperan dalam fenomena konflik pada Pemilu 2019 di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Medsos sudah menggeser dan mengalahkan media cetak maupun media elektronik dalam memicu konflik di dua provinsi ini. Melalui media handphone (hp) yang saat ini dimiliki oleh hampir semua orang, serta sifatnya yang praktis, sederhana, dan cepat, maka tak pelak lagi instrumen ini mendominasi semua pertukaran informasi secara masif. Informasi-informasi yang bersifat hoax merupakan amunisi sumber konflik yang sangat besar pada Pemilu 2019. Fenomena ini diakui oleh semua informan di lapangan. Sebagaimana dipaparkan oleh beberapa informan berikut ini.

Dalam hal ini media yang menjadikan konflik itu tercipta yaitu media sosial, sedangkan media koran untuk saat ini sudah jarang sekali masuk ke daerah ini dan media televisi pun sangat jarang untuk mereka tonton. Namun untuk media sosial hampir setiap orang mengunakanya dan

website yang lebih cenderung mengarahkan ke konflik tersebut ialah aplikasi Facebook dan WhatsApp group. (Sardani).

Media sosial menjadi salah satu media tercepat yang mereka gunakan dalam mendapatkan informasi-informasi politik selain itu juga ada media secara langsung seperti door to door, mulut ke mulut, informasi yang didapatkan dari para tetangga, teman sejawat. Untuk media yang berbau keagamaan pun juga ada terlibat didalamnya seperti media yang memuat tentang keagamaan dan juga leaflet tentang keagamaan. (Syarwandi).

Mereka lebih banyak mendapatkan informasi-informasi tersebut dari media sosial yang juga hampir semua orang menggunakannya. Banyak dari masyarakat yang belum bisa memilah mana informasi yang fakta atau palsu. Selain informasi yang mereka dapatkan seperti pada Facebook, group WhatsApp, kemudian kadang ada juga konten-konten keagamaan dari beberapa sumber lain yang agak keras dalam hal kritik maupun konten yang juga berpengaruh.

1. Konflik Bernuansa Religius-Politis

Pemilu 2019 (baik pada saat Pemilu maupun pasca Pemilu) terjadi konflik bernuansa religius-politis pada masyarakat di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Konflik tersebut berada pada tingkat RT/RW sampai dengan tingkat kabupaten bahkan beberapa kabupaten. Namun konflik tersebut tidak meluas, sehingga tidak berimplikasi luas dari aspek kewilayahan dan demografis.

Konflik lebih disebabkan oleh persaingan calon anggota legislatif (DPR, DPRD, dan DPD) sebagai faktor utama penyebab konflik yang menyeret faktor keagamaan dengan segala unsurnya. Keyakinan agama menjadi faktor terbesar berkontribusi terhadap fenomena konflik. Perbedaan agama khususnya di Kalimantan Tengah juga berpengaruh penting. Kedua pasang capres-cawapres dipersepsi memiliki jati diri keagamaan yang berbeda.

Keterlibatan tokoh-tokoh agama berkontribusi terhadap konflik dan memiliki pengaruh besar. Selain itu tokoh-tokoh organisasi keagamaan juga memiliki peran yang besar dalam peristiwa konflik dengan melibatkan emosi (perasaan) keagamaan, simbol-simbol keagamaan, tempat ibadah, organisasi keagamaan, dan lembaga keagamaan.

Pengetahuan agama para pengikut atau peserta konflik menurut responden cukup luas, bahkan dalam kehidupan sehari-hari memiliki perilaku dan pengamal agama yang baik serta taat beribadah. Mereka bahkan sebagian besar tergabung dalam jamaah pengajian atau majlis ta'lim tertentu.

Media ceramah agama dan media cetak keagamaan turut mempengaruhi kondisi konflik. Pengaruh media sosial (medsos) berperan sangat besar terhadap terjadinya konflik pada Pemilu 2019.

Kecendrungan pilihan politik masyarakat terhadap partai yang bukan partai berlandaskan agama (partai agama) yakni partai nasionalis cukup besar. Mereka juga beranggapan bahwa memilih wakil rakyat yang seagama tidak menjamin wakilnya nanti dapat memperjuangkan

kepentingan agama maupun memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Disamping itu, mereka tidak meyakini mereka lebih jujur dan amanah.

2. Integrasi Pasca Konflik

Faktor agama dipandang tidak cukup kuat berperan dalam mewujudkan integrasi pasca konflik. Peran tokoh agama diragukan dalam proses integrasi, begitu pula peran ceramah agama, tempat ibadah. Para responden tidak optimis bahwa kerukunan umat beragama lebih kuat terjalin pasca Pemilu 2019.

Terdapat hubungan yang signifikan antara konflik dengan integrasi pada Pemilu 2019 pada masyarakat Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Juga terdapat hubungan antara sub-sub variabel integrasi (perekat dan proses integrasi) dengan variabel integrasi.

Penutup

1. Kesimpulan

Pemilu 2019, baik pemilihan presiden-wakil presiden maupun pemilihan anggota legislatif di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah melibatkan faktor agama ke arena konflik dengan segala unsurnya, yakni paham keagamaan, lembaga keagamaan, organisasi keagamaan, tokoh agama, simbol keagamaan, dan tempat ibadah dengan intensitasnya masing-masing. Sedangkan proses integrasi berjalan secara alamiah dan tergantikan dengan datangnya momen-momen politik baru seperti Pemilihan Kepala Daerah. Peran tokoh agama dipersepsi tidak signifikan dalam mewujudkan integrasi.

2. Saran

Direkomendasikan agar pihak-pihak terkait, diantaranya Kementerian Agama di daerah, pemerintah daerah, dan pihak penyelenggara maupun badan pengawas Pemilu dapat menanggulangi sisa-sisa konflik akibat Pemilu 2019 dengan semakin merekatkan integrasi melalui rekayasa sosial secara kondusif. Pihak perguruan tinggi, terutama UIN dan STAIN dapat terus mengadakan kajian-kajian ilmiah sebagai langkah antisipatif terjadinya disharmoni sosial. Selain itu revitalisasi fungsi dan peran agama perlu ditingkatkan oleh organisasi-organisasi dan lembaga-lembaga keagamaan.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman, Moeslim. *Islam Sebagai Kritik Sosial*. Erlangga, 2003.
- Ardiansyah, Syaifuddin Iskandar. "Konflik Etnis Samawa Dengan Etnis Bali: Tinjauan Sosial Politik Dan Upaya Resolusi Konflik." *Journal Unair Tahun 23* (2010).
- Arifin, Syamsul. "Kontruksi Wacana Pluralisme Agama Di Indonesia." *Jurnal Humanity* 5, no. 1 (2012).
- Firmansyah, Anwar, and Tiffany Setyo Pratiwi. "Agama Dan Pembangunan: Beragam Pandangan Dalam Melihat Keberkaitan Agama Terhadap Proses Pembangunan Dan Modernisasi." *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional* 15, no. 1 (2019): 1–12.
- Haryono, Bagus, Edy Tri Sulistyono, and Ahmad Zuber. "Model Pendidikan Partisipatif

- Empat Pilar Bangsa Bagi Integrasi Nasional.” *Komunitas: International Journal of Indonesia Society and Culture* 5, no. 2 (2013).
- Isya, Muhammad Andi. “Pendidikan Dan Konflik (Potret Konflik Sunni-Syiah Dan Imbasnya Terhadap Pendidikan Di Bangil Kabupaten Pasuruan).” *Progressa: Journal of Islamic Religious Instruction* 2, no. 1 (2018): 13–14.
- Kurniawan, M. Agus. “Multikultural: Wacana Pendidikan Islam Yang Belum Baku.” *Ri’ayah: Journal of Social and Religious* 2, no. 02 (2017): 105–119.
- Machali, Imam. “Peace Education Dan Deradikalisasi Agama.” *Jurnal Pendidikan Islam* 2, no. 1 (2013): 41–64.
- Mihran, Muhammad. “Peran Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Konflik Agama” (2009).
- Redaksi, Tim. *Fiqh Rakyat; Pertautan Fiqh Dengan Kekuasaan*. LKIS PELANGI AKSARA, 2000.
- Sawir, Muhammad. “Empat Pilar Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara.” *JLAP: Journal of Administration Science and Governmental Science* 1, no. 1 (2016).
- St Aisyah, B. M. “Konflik Sosial Dalam Hubungan Antar Umat Beragama.” *Jurnal Dakwah Tabligh* 15, no. 2 (2014): 189–208.
- Yahya, Muhammad. “Pendidikan Islam Pluralis Dan Multikultural.” *Lentera Pendidikan: Jurnal Ilmu Tarbiyah dan Keguruan* 13, no. 2 (2010): 175–191.